

Bangun Jalan Tol Trans Sumatera Harus Lewat Tender.

[JAKARTA] Pemerintah diminta terbuka dan transparan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang membentang dari Bakauheni hingga Banda-Hang Nadim, Batam.

Untuk itu, pembangunan jalan tol yang akan memakai dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hingga Rp 330 triliun itu harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua badan usaha milik negara (BUMN) dibidang karya (konstruksi) untuk dapat berpartisipasi, lewat proses tender yang transparan.

Demikian dikatakan praktisi dan pengamat hukum publik, Feizal Syahmenan SH MH, kepada pers usai menghadiri acara diskusi terbatas, dengan tema, "Menolak Penunjukan Langsung Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatera," di Jakarta, Senin (25/3).

Dalam acara yang diselenggarakan Institute For Public Trust, itu Feizal mengatakan, pembangunan jalan lewat penunjukkan langsung pasti rawan dengan manipulasi dan korupsi. Demikian halnya ketika jalan tol tersebut sudah selesai,

pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama lewat tender kepada semua BUMN untuk menjadi pengelola jalan tol tersebut.

Ia menegaskan, tujuan dari pembangunan jalan Tol Trans Sumatera itu bagus, mempercepat pembangunan masyarakat dan daerah Sumatera. Tetapi niat yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang penuh misteri, melanggar hukum dan peraturan yang berlaku saat ini. Karena itu penunjukkan langsung kepada satu perusahaan tertentu untuk

membangun dan menjadi operator jalan tol trans Sumatera harus dihentikan.

Feizal membantah pernyataan dari pihak tertentu yang menyebutkan, penunjukkan PT Utama Karya (Persero) untuk membangun dan mengelola jalan Tol Trans Sumatera karena tidak adanya badan usaha lain yang berminat, padahal sudah diadakan beberapa kali tender. Menurut Feisal dalam kenyataannya baru ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya yang sudah ditender, sedangkan ruas lainnya belum pernah ditender. [E-8]